BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WAGUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WAGUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Reneana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 331);
31. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 338/29/X/2025 tentang Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025; dan

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Atas Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

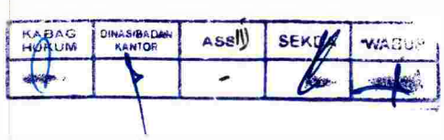

6. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Boalemo.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Boalemo.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.857.606.086.308,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.52.606.849.552,98 (lima puluh dua miliar enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.804.999.236.755,02 (delapan ratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan /atau

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.81.228.963.308,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp..7.936.548.371,02 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp.89.165.511.679,02 (delapan puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma nol dua rupiah) yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.12.919.391.229,44 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.8.844.234.738,02 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.763.625.967,46 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lina ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.816.240.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.378.816.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah sehingga menjadi Rp.2.195.056.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) bertambah sebesar

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

Rp.116.653.612,00 (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp.7.116.653.612,00 (tujuh miliar seratus enam belasjuta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).

(5) Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.493.332.078,56 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan koma lima enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.403.155.979,00 (satu miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.58.090.176.099,56 (lima puluh delapan milyar sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.12.919.391.229,44 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.8.844.234.738,02 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.763.625.967,46 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari atas:

a. pajak Reklame;
b. Pajak Sarang Burung Walet;
c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB$^{P2}$);
e. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
f. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); dan/atau
g. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan/atau
h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp.52.635.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.256.635.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(3) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

(4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.228.800.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.570.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.658.400.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.580.818.715,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah); berkurang sebesar Rp.40.392.191,00 (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.540.426.524,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

(6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.299.548.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesara Rp.78.045.550,00 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.377.594.350,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.410.806.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.1.492.266.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.5.903.072.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

(8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.690.325.898,26 (dua miliar enam ratus Sembilan puluhjuta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh enam rupiah)

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

bertambah sebesar Rp.3.577.512.275,04 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp.6.267.838.173,30 (enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh rupiah).

(9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.499.891.816,18 (dua miliar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.4.257.168.103,98 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu serratus tiga koma Sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.6.757.059.920,16 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh koma enam belas rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.816.240.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.378.816.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.195.056.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha;
c. retribusi Tempat Pelelangan; dan/atau
d. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.855.000.00,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.366.696.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.221.696.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.691.240.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.880.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus

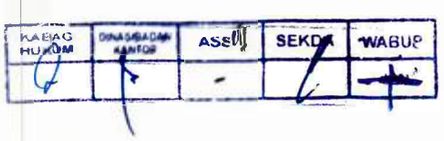

delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.663.360.000,00 (enam ratus enam puluh tigajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang merupakan penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, bertambah sebesar Rp.116.653.612,00 (seratus enam belasjuta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp.7.116.653.612,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.59.493.332.078,56 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.403.155.979,00 (satu miliar empat ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.58.090.176.099,56 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri:
   a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
   b. jasa giro;
   c. pendapatan bunga;
   d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
   e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   f. pendapatan dari pengembalian;
   g. pendapatan denda pajak daerah;
   h. pendapatan BLUD; dan/atau

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas eksehatan tingkat pertama (FKTP).

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjdai Rp.1.051.000.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta rupiah).

(4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.445.463.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.295.463.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

(8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.850.904.771,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

(9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.56.447.869.078,56 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.4.026.597.750,00 (empat miliar dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.52.421.271.328,56 (lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma lima puluh enam rupiah).

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.776.377.123.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.61.386.197.924,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.714.990.925.076,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan/atau
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.65.715.176.568,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.697.156.946.432,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.762.872.123.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.65.715.176.568,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus lima belas juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.697.156.946.432,00 (enam ratus sembilan puluh

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

tujuh miliar seratus lima puluhy enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri dari:

a. dana desa;
b. insentif fiskal;
c. dana bagi hasil (DBH);
d. dana alokasi umum (DAU); dan/atau
e. dana alokasi khusus (DAK).

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.679.459.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilanjuta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.830.378.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.803.171.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

(5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.478.321.450.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.27.782.276.965,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.450.539.173.035,00 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah).

(6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.197.237.665.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.37.932.899.603,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.159.304.765.397,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yakni pendapatan bagi hasil.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.505.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.328.978.644,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.833.978.644,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.842.800.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pendapatan hibah.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.842.800.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah semula sebesar Rp.857.706.086.308,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.23.312.244.936,13 (dua puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.834.393.841.371,87 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tigajuta delapan ratus empat puluh satu tiga ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS[illegible] | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

c. belanja tidak terduga; dan/atau
d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.622.567.521.899,06 (enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma nol enam rupiah), berkurang sebesar Rp.15.227.281.826,19 (lima belas miliar dua ratus dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.607.340.240.072,87 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh ribui tujuh puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan/atau
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.415.500.447.702,19 (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.373.515.787,09 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma nol Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.411.126.931.915,10 (empat ratus sebelas miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima belas koma sepuluh rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.9.288.566.039,10 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh Sembilan koma sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp.189.919.217.773,77 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tujuh pih tujuh ru piah )

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.565.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.294.090.384,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupian).

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.415.500.447.702,19 (empat ratus lima belas miliar lima ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah koma sembilan belas) berkurang sebesar Rp.4.373.515.787,09 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma nol sembilan rupian) sehingga menjadi Rp.411.126.931.915,10 (empat ratus sebelas miliar serratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima belas koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan/atau
f. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.114.689.596,18 (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus empat belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 14.500.277.257,53 (empat belas miliar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma lima tiga rupian) sehingga menjadi Rp. 266.614.412.338,65 (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus empat belas juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah).

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.2 53.493.397,01 (sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma satu rupiah) bertambah sebesar Rp.12.626.956.446,19 (dua belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam koma sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.108.880.449.843,20 (serratus delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.931.429.680,00 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.480.897.523,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.12.412.327.203,00 (dua belas miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.338.376.502,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 50.266.484,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.288.110.018,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan belas rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebessar Rp.25.151.578.527,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.730.826.014,75 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat belas koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.22.420.752.512,25 (dua puluh dua

| KABAG HUKUM | DINASBADAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua belas koma dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.199.207.783.812,87 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.9.288.566.039,10 (sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga puluh Sembilan koma sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp.189.919.217.773,77 (serratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja dan/ataujasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang danjasa BOSP;
   g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan/atau
   h. belanja barang dan jasa BLUD

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.726.535.684,19 (empat puluh empat miliyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.235.924.975,80 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.42.490.610.708,39 (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan koma tiga puluh Sembilan rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.690.585.165,68 (enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.540.427.455,49 (satu miliar lima ratus empat

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima koma empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 64.231.012.621,17 (enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua belas ribu enam ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.696.728.345,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.1.216.873.475,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) Sehingga menjadi Rp. 4.479.854.870,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.005.830.967,00 (dua puluh tujuh milyar lima juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.5.042.787.214,06 (lima miliar empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas koma nol enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 21.963.043.752,94 (dua puluh satu miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.808.865.000,00 (delapan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.654.950.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.463.815.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.445.872.000,00 (dua puluh satu miliyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.605.163.173,41 (lima miliar enam ratus lima juta serratus enam puluh tiga ribu serratus tujuh puluh tiga koma empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 15.840.708.826,59 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

tujuh ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah.

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.917.154.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.604.155.000,00 (enam ratus empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.521.309.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.916.212.651,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.012.650.343,68 (dua milar dua belas juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.31.928.862.994,68 (tiga puluh satu miliar Sembilan ratus dua puuluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat koma enam puluh delapan rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.7.859.290.384,00 (tujuh miliyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.565.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.294.090.384,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;;
   b. belanja hibah dana BOS;
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
   d. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.215.000.000,00 (empatmilyar dua ratus lima belasjuta rupiah) berkurang sebesar Rp.1.867.200.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

rupiah) sehingga menjadi Rp.2.347.800.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 769.295.384 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.874.995.000,00 (dua milar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.176.995.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.114.111.660.632,00 (seratus empat belas miliyar serratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.6.650.128.552,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta serratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 107.461.532.080,00 (sertus tujuh miliarempat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;
f. belanja modal aset lainnya; dan/atau
g. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.022.160.600,00 (tiga puluh lima miliyar dua puluh duajuta serratus enam puluh ribu enam ratus

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

rupiah) bertambah sebesar Rp.12.749.854.307,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 47.772.014.907,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh duajuta empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.34.947.626.032,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.354.281.813,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp.32.593.344.219,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus Sembilan belas rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.951.874.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.21.793.116.322,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.22.158.757.678,00 (dua puluh dua miliar serratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.942.415.276,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.120.026.903.776,94 (seratus dua puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.1.434.834.557,94 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 118.592.069.219,00 (serratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan/atau

b. belanja bantuan keuangan;

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.473.563.122,94 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.922.505.110,06 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima ribu serratus sepuluh koma nol enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.396.068.233,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten boalemo dan desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten boalemo kepada pemerintah desa.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.118.553.340.654,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.2.357.339.668,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.116.196.000.986,00 (serratus enam belas miliar serratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp.29.294.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.29.394.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan;
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bertambah sebesar Rp.29.294.604.616,85 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 29.394.604.616,85 (dua puluh sembilan milar tiga ratus sembilan puluh empatjuta enam ratus empat ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh lima rupiah) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 24

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

| KABAG HUKUM | DINASBADAM KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang/Jasa yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | Asisten | SEKDA | WAGUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 24 Oktober 2025
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 19 )

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 24 Oktober 2025

**KABUPATEN BOALEMO**

**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **81.228.963.308,00** | **89.165.511.679,02** | **7.936.548.371,02** |
| 4.101 | Pajak Daerah | 12.919.311.229,44 | 21.763.625.967,46 | 8.844.234.738,02 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 204.000.000,00 | 256.635.000,00 | 52.635.000,00 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 165.000.000,00 | 172.660.000,00 | 7.660.000,00 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 165.000.000,00 | 172.660.000,00 | 7.660.000,00 |
| 4.101.09.02 | Pajak Reklame Kain | 35.000.000,00 | 67.475.000,00 | 32.475.000,00 |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 35.000.000,00 | 67.475.000,00 | 32.475.000,00 |
| 4.1.01.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 4000000,00 | 15.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 4.1.01.09.030001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 4000000,00 | 15.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 5.200.000,00 | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 |
| 4.1.01.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 5.200.000,00 | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 5.200.000,00 | 2.600.000,00 | -2.600.000,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.228.800.000,00 | 658.400.000,00 | -570.400.000,00 |
| 4.1.01.14.12 | Pajak Granit/Andesit | 765.500.000,00 | 401.500.000,00 | -364.000.000,00 |
| 4.1.01.14.12.0001 | Pajak Granit/Andesit | 765500.000,00 | 401.500.000,00 | -364.000.000,00 |
| 4.1.01.14.23 | Pajak Pasir dan Kerikil | 259.300.000,00 | 136.300.000,00 | -123.000.000,00 |
| 4.1.01.14.230001 | Pajak Pasir dan Kerikil | 259.300.000,00 | 136.300.000,00 | -123.000.000,00 |
| 4.1.01.14.24 | Pajak Pasir Kuarsa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.01.14.24.0001 | Pajak Pasir Kuarsa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.01.14.29 | Pajak Tanah Diatome | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 | -80.000.000,00 |
| 4.1.01.14.29.0001 | Pajak Tanah Diatome | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 | -80.000.000,00 |
| 4.1.01.14.30 | Pajak Tanah Liat | 3.900.000,00 | 600.000,00 | -3.300.000,00 |
| 4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat | 3900.000,00 | 600.000,00 | -3300.000,00 |
| 4.101.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASISTEN | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 1.580.818.715,00 | 1.540.426.524,00 | -40.392.191,00 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 1.580.818.715,00 | 1.540.426.524,00 | -40.392.191,00 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 1.580.818.715,00 | 1.540.426.524,00 | -40.392.191,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 299.548.800,00 | 377.594.350,00 | 78.045.550,00 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 157.548.800,00 | 81.057.600,00 | -76.491.200,00 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 157.548.800,00 | 81.057.600,00 | -76.491.200,00 |
| 4.1.01.16.02 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 142.000.000,00 | 296.536.750,00 | 154.536.750,00 |
| 4.1.01.16.02.0001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru | 142.000.000,00 | 296.536.750,00 | 154.536.750,00 |
| 4.1.01.19 | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 4.410.806.000,00 | 5.903.072.000,00 | 1.492.266.000,00 |
| 4.1.01.19.01 | PBJT-Makanan dan/atau Minuman | 500.000.000,00 | 892.000.000,00 | 392.000.000,00 |
| 4.1.01.19.01.0001 | PBJT-Restoran | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.01.19.01.0002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering | 450.000.000,00 | 842.000.000,00 | 392.000.000,00 |
| 4.1.01.19.02 | PBJT-Tenaga Listrik | 3.750.780.000,00 | 4.800.000.000,00 | 1.049.220.000,00 |
| 4.1.01.19.020001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 3.750.780.000,00 | 4.800.000.000,00 | 1.049.220.000,00 |
| 4.1.01.19.03 | PBJT-Jasa Perhotelan | 147.186.000,00 | 210.072.000,00 | 62.886.000,00 |
| 4.1.01.19.03.0001 | PBJT-Hotel | 51.678.000,00 | 68.160.000,00 | 16.482.000,00 |
| 4.1.01.19.03.0003 | PBJT-Vila | 48.732.000,00 | 81.072.000,00 | 32.340.000,00 |
| 4.1.01.19.03.0009 | PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage | 46.776.000,00 | 60.840.000,00 | 14.064.000,00 |
| 4.1.01.19.05 | PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan | 12.840.000,00 | 1.000.000,00 | -11.840.000,00 |
| 4.1.01.19.05.0006 | PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap | 7.440.000,00 | 1.000.000,00 | -6.440.000,00 |
| 4.1.01.19.05.0009 | PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran | 3.600.000,00 | 0,00 | -3.600.000,00 |
| 4.1.01.19.05.0010 | PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | 1.800.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 4.1.01.20 | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 2.690.325.898,26 | 6.267.838.173,30 | 3.577.512.275,04 |
| 4.1.01.20.01 | Opsen PKB | 2.690.325.898,26 | 6.267.838.173,30 | 3.577.512.275,04 |
| 4.1.01.20.01.0001 | Opsen PKB | 2.690.325.898,26 | 6.267.838.173,30 | 3.577.512.275,04 |
| 4.1.01.21 | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.499.891.816,18 | 6.757.059.920,16 | 4.257.168.103,98 |
| 4.1.01.21.01 | Opsen BBNKB | 2.499.891.816,18 | 6.757.059.920,16 | 4.257.168.103,98 |
| 4.1.01.21.01.0001 | Opsen BBNKB | 2.499.891.816,18 | 6.757.059.920,16 | 4.257.168.103,98 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.816.240.000,00 | 2.195.056.000,00 | 378.816.000,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 855.000.000,00 | 1.221.696.000,00 | 366.696.000,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 85.000.000,00 | 100.192.000,00 | 15.192.000,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | Asisten | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.02.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 85.000.000,00 | 100.192.000,00 | 15.192.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 150.000.000,00 | 206.304.000,00 | 56.304.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 150.000.000,00 | 206.304.000,00 | 56.304.000,00 |
| 4.102.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 620.000.000,00 | 915.200.000,00 | 295.200.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 500000.000,00 | 719.840.000,00 | 219.840.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 120.000.000,00 | 195.360.000,00 | 75.360.000,00 |
| 4.1.02.01.14 | Retribusi Pelayanan Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.01.14.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.01.14.0002 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 691.240.000,00 | 663.360.000,00 | -27.880.000,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 196.600.000,00 | 158.000.000,00 | -38.600.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 31.000.000,00 | 1.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan | 22.500.000,00 | 7.000.000,00 | -15.500.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 128.100.000,00 | 150.000.000,00 | 21.900.000,00 |
| 4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 110.000.000,00 | 104.400.000,00 | -5.600.000,00 |
| 4.1.02.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 110.000.000,00 | 104.400.000,00 | -5.600.000,00 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 334.640.000,00 | 350.960.000,00 | 16.320.000,00 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 334.640.000,00 | 350.960.000,00 | 16.320.000,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 270.000.000,00 | 310.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 270.000.000,00 | 310.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 270.000.000,00 | 310.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.000.000.000,00 | 7.116.653.612,00 | 116.653.612,00 |
| 4.1.03.03 | Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 7.000.000.000,00 | 7.116.653.612,00 | 116.653.612,00 |
| 4.1.03.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 7.000.000.000,00 | 7.116.653.612,00 | 116.653.612,00 |
| 4.1.03.03.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta | 7.000.000.000,00 | 7.116.653.612,00 | 116.653.612,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 59.493.332.078,56 | 58.090.176.099,56 | -1.403.155.979,00 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |



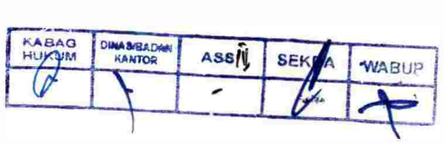

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 1.100.00o.000,00 | 1.051.000.000,00 | -49.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.0o0.00o.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.05.02 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 100.000.000,00 | 25.000.000,00 | -75.000.000,00 |
| 4.104.05.02.0001 | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 100.000.000,00 | 25.000.000,00 | -75.000.000,00 |
| 4.1.04.05.06 | Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4.1.04.05.06.0001 | Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4.1.04.05.07 | Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.1.04.05.07.0001 | Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 1.445.463.000,00 | 1.150.000.000,00 | -295.463.000,00 |
| 4.1.04.08.01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 1.445.463.000,00 | 1.000.000.000,00 | -445.463.000,00 |
| 4.1.04.08.01.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 1.445.463.000,00 | 1.000.000.000,00 | -445.463.000,00 |
| 4.1.04.08.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| 4.1.04.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 4.1.04.12.19 | Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4.1.04.12.19.0001 | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4.1.04.12.19.0002 | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.04.12.19.0005 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4.1.04.12.19.0013 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 2.850.904.771,00 | 2.850.904.771,00 |
| 4.1.04.15.04 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.15.04.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 4.1.04.15.30 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 2.840.904.771,00 | 2.840.904.771,00 |
| 4.1.04.15.30.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 2.840.904.771,00 | 2.840.904.771,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 56.447.869.078,56 | 52.421.271.328,56 | -4.026.597.750,00 |
| 4.1.04.16.02 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 33.840.635740,00 | 1.718.476.000,00 | -32.122.159.740,00 |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 33840.635.740,00 | 1.718.476.000,00 | -32.122.159.740,00 |
| 4.1.04.16.04 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 22.428.330.138,56 | 50.633.013.328,56 | 28.204.683.190,00 |
| 4.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 22.428.330.138,56 | 50.633.013.328,56 | 28.204.683.190,00 |
| 4.1.04.16.05 | Pendapatan BLUD dari APBD | 118.603.200,00 | 0,00 | -118.603.200,00 |
| 4.1.04.16.05.0001 | Pendapatan BLUD dari APBD | 118.603.200,00 | 0,00 | -118.603.200,00 |
| 4.1.04.16.06 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 60.300.000,00 | 69.782.000,00 | 9.482.000,00 |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro | 60.300.000,00 | 69.782.000,00 | 9.482.000,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **776.377.123.000,00** | **714.990.925.076,00** | **-61.386.197.924,00** |
| 4.201 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 762.872.123.000,00 | 697.156.946.432,00 | -65.715.176.568,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 69.679.459.000,00 | 69.679.459.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 69.679.459.000,00 | 69.679.459.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 69.679.459.000,00 | 69.679.459.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.06 | Insentif Fiskal | 8.830.378.000,00 | 8.830.378.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.06.02 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya | 8.830.378.000,00 | 8.830.378.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.06.02.0001 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya | 8.830.378.000,00 | 8.830.378.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.07 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 8.803.171.000,00 | 8.803.171.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.07.01 | DBH Pajak | 5.139.602.000,00 | 5.139.602.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.07.01.0001 | DBH PBB | 2329.646.000,00 | 2.329.646.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.07.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 2.809.956.000,00 | 2.725.432.000,00 | -84.524.000,00 |
| 4.2.01.07.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 0,00 | 84.524.000,00 | 84.524.000,00 |
| 4.2.01.07.02 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) | 1.522.614.000,00 | 1.522.614.000,00 | 0,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.01.07.02.0004 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent | 10.036.000,00 | 340.000,00 | -9.696.000,00 |
| 4.2.01.07.02.0005 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty | 0,00 | 9.696.000,00 | 9.696.000,00 |
| 4.2.01.07.02.0006 | DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 269.389.000,00 | 269.389.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.07.02.0009 | DBH SDA Perikanan | 1.243.189.000,00 | 1.243.189.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.07.03 | DBH Lainnya | 2.140.955.000,00 | 2.140.955.000,00 | 0,00 |
| 4.201.07.03.0001 | DBH Sawit | 2.140.955.000,00 | 2.140.955.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.08 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 478.321.450.000,00 | 450.539.173.035,00 | -27.782.276.965,00 |
| 4.201.08.01 | DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya | 379.443.941.000,00 | 379.294.849.035,00 | -149.091.965,00 |
| 4.2.01.08.01.0001 | DAU | 379.443.941.000,00 | 379.294.849.035,00 | -149.091.965,00 |
| 4.201.08.02 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya | 98.877.509.000,00 | 71.244.324.000,00 | -27.633.185.000,00 |
| 4.2.01.08.02.0003 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 2.323.138.000,00 | 2323138.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.08.02.0004 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 41.249.851.000,00 | 41.249.851.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.08.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 27.671.335.000,00 | 27.671.335.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.08.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 27.633.185.000,00 | 0,00 | -27.633.185.000,00 |
| 4.201.09 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 197.237.665.000,00 | 159.304.765.397,00 | -37.932.899.603,00 |
| 4.2.01.09.01 | DAK Fisik | 88.019.110.000,00 | 51.826.027.388,00 | -36.193.082.612,00 |
| 4.2.01.09.01.0066 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD | 1.947.332.000,00 | 1.947.332.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.01.0075 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan | 52.763.604.000,00 | 49.878.695.388,00 | -2.884.908.612,00 |
| 4.2.01.09.01.0077 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah | 33.308.174.000,00 | 0,00 | -33.308.174.000,00 |
| 4.2.01.09.02 | DAK Non Fisik | 109218.555.000,00 | 107.478.738.009,00 | -1.739.816.991,00 |
| 4.201.09.02.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 59.000.972.000,00 | 59.000.972.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 710.250.000,00 | 710.250.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.020006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 4.017.263.000,00 | 4.017.263.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 505.690.000,00 | 505.690.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0026 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | 18.700.612.000,00 | 18.560.431.086,00 | -140.180.914,00 |
| 4.2.01.09.020027 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja | 1.374.000.000,00 | 1.374.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.020028 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 4.181.660.000,00 | 4.181.660.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 375.320.000,00 | 375.320.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0033 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 7.316.992.000,00 | 7.316.992.000,00 | 0,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.01.09.02.0034 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 296.748.000,00 | 296.748.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 9.114.248.000,00 | 7.055.281.923,00 | -2.058.966.077,00 |
| 4.2.01.09.02.0039 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3.489.800.000,00 | 3.489.800.000,00 | 0,00 |
| 4.2.01.09.02.0044 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian | 0,00 | 459.330.000,00 | 459.330.000,00 |
| 4.202 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 13.505.000.000,00 | 17.833.978.644,00 | 4.328.978.644,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 13.505.000.000,00 | 17.833.978.644,00 | 4.328.978.644,00 |
| 4.202.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 13.505.000000,00 | 17.833.978.644,00 | 4.328.978.644,00 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 0,00 | 618.609.982,00 | 618.609.982,00 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 0,00 | 703.368.662,00 | 703.368.662,00 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 6.500.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 5.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 7.000.000.000,00 | 8.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,00** | **842.800.000,00** | **842.800.000,00** |
| 4.301 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 842.800.000,00 | 842.800.000,00 |
| 4.3.01.06 | Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis | 0,00 | 842.800.000,00 | 842.800.000,00 |
| 4.3.01.06.01 | Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis | 0,00 | 842.800.000,00 | 842.800.000,00 |
| 4.3.01.06.01.0001 | Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis | 0,00 | 842.800.000,00 | 842.800.000,00 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **857.606.086.308,00** | **804.999.236.755,02** | **-52.606.849.552,98** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **622.567.521.899,06** | **607.340.240.072,87** | **-15.227.281.826,19** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 415.500.447.702,19 | 411.126.931.915,10 | -4.373.515.787,09 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 281.114.689.596,18 | 266.614.412.338,65 | -14.500.277.257,53 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 210.115.239.633,88 | 200.548.324.015,90 | -9.566.915.617,98 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 164.618.146.117,88 | 152.797.390.468,90 | -11.820.755.648,98 |
| 5.1.01.01.010002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 45.497.093.516,00 | 47.750.933.547,00 | 2.253.840.031,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 19.559.073.511,54 | 19.085.508.522,07 | -473.564.989,47 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 15.620.452.610,22 | 14.904.516.800,49 | -715.935.809,73 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 3.938.620.901,32 | 4.180.991.721,58 | 242.370.820,26 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 4.013.684.912,00 | 3.733.823.373,92 | -279.861.538,08 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 4.013.684.912,00 | 3.733.823.373,92 | -279.861.538,08 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 16.545.565.700,00 | 16.067.569.170,00 | -477.996.530,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 12.043.438.700,00 | 11.431.110.280,00 | -612.328.420,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 4.502.127.000,00 | 4.636.458.890,00 | 134.331.890,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 2.186.698.858,00 | 2.195.757.600,00 | 9.058.742,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 2.165.698.858,00 | 2.100.886.000,00 | -64.812.858,00 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 21.000.000,00 | 94.871.600,00 | 73.871.600,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 11.965.721.607,00 | 11.622.334.724,80 | -343.386.882,20 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 9.236.721.644,20 | 8.745.913.954,60 | -490.807.689,60 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 2.728.999.962,80 | 2.876.420.770,20 | 147.420.807,40 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 238.692.633,46 | 239.456.850,25 | 764.216,79 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 238.692.633,46 | 239.456.850,25 | 764.216,79 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 3.132.516,30 | 2.785.086,86 | -347.429,44 |
| 5.1.01.01.080001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 2.509.374,98 | 2.096.022,21 | -413.352,77 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 623.141,32 | 689.064,65 | 65.923,33 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 14.558.427.054,00 | 11.190.399.824,85 | -3.368.027.229,15 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12.440.778.612,00 | 9.072.751.382,85 | -3.368.027.229,15 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 2.117.648.442,00 | 2.117.648.442,00 | 0,00 |
| 5.101.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 482.114.276,00 | 482.114.276,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 374.861.466,00 | 374.861.466,00 | 0,00 |
| 5101.01.100002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 107.252.810,00 | 107.252.810,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 1.446338.894,00 | 1.446.338.894,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1.124.592.322,00 | 1.124.592.322,00 | 0,00 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 321.746572,00 | 321.746.572,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 96.253.493.397,01 | 108.880.449.843,20 | 12.626.956.446,19 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 6.281.904.546,00 | 8.524.252.997,50 | 2.242.348.451,50 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 6.281.904.546,00 | 8.524.252.997,50 | 2.242.348.451,50 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 2.805.900.000,00 | 1.371.327.000,00 | -1.434.573.000,00 |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 2.805.900.000,00 | 1.371.327.000,00 | -1.434.573.000,00 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi KerjaASN | 21.360.979.498,01 | 33.287.937.029,70 | 11.926.957.531,69 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 21.360.979.498,01 | 33.287.937.029,70 | 11.926.957.531,69 |
| 5.1.01.02.06 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 65.804.709.353,00 | 65.696.932.816,00 | -107.776.537,00 |
| 5.1.01.02.06.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel | 4.930.731,00 | 7.037.412,00 | 2.106.681,00 |
| 5.1.01.02.06.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran | 16.750.000,00 | 29.882.000,00 | 13.132.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan | 430.140,00 | 33.500,00 | -396.640,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.01.02.06.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame | 6.834.000,00 | 8.597.273,00 | 1.763.273,00 |
| 5.1.01.02.06.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan | 125.651.130,00 | 0,00 | -125.651.130,00 |
| 5.1.01.02.06.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet | 174.200,00 | 87.100,00 | -87.100,00 |
| 5.1.01.02.06.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 41.164.800,00 | 22.056.400,00 | -19.108.400,00 |
| 5.1.01.02.06.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 52.957.427,00 | 51.604.289,00 | -1.353.138,00 |
| 5.1.01.02.06.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 10.034.885,00 | 15.211.866,00 | 5.176.981,00 |
| 5.1.01.02.06.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 2.847.500,00 | 3.356.432,00 | 508.932,00 |
| 5.1.01.02.06.0025 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 0,00 | 6.911.184,00 | 6.911.184,00 |
| 5.1.01.02.06.0026 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 20.770.000,00 | 30.659.200,00 | 9.889.200,00 |
| 5.1.01.02.06.0035 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 2365.100,00 | 335.000,00 | -2.030100,00 |
| 5.1.01.02.06.0036 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 1675.000,00 | 1.675.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.06.0037 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan | 3685.000,00 | 4.500.000,00 | 815.000,00 |
| 5.1.01.02.06.0043 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 11.210.440,00 | 11.757.160,00 | 546.720,00 |
| 5.1.01.02.06.0050 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 9.045.000,00 | 9.045.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.06.0064 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 59.000.972.000,00 | 59.000.972.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.06.0065 | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 4.017.263.000,00 | 4.017.263.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.06.0066 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 710.250.000,00 | 710.250.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.060067 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.765.699.000,00 | 1.765.699.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 11.931.429.680,00 | 12.412.327.203,00 | 480.897.523,00 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 567.032.838,00 | 567.032.838,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 567.032.838,00 | 567.032.838,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 82.363.400,00 | 82.363.400,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 82.363.400,00 | 82.363.400,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 92888.320,00 | 92.888.320,00 | 0,00 |



| KA BAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS II | SEKDA | WAKIL UP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 92.888.320,00 | 92.888.320,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 72.132.000,00 | 72.132.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 72.132.000,00 | 72.132.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 842.233.000,00 | 842.233.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.050001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 842.233.000,00 | 842.233.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 103.657.200,00 | 103.657.200,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 103.657.200,00 | 103.657.200,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan K0munikasi Intensif Pimpinan dan Angg0ta DPRD | 1.890.000.000,00 | 1.890.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.890.000.000,00 | 1.890.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 472.500.000,00 | 472.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 472.500.000,00 | 472.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 111.102.922,00 | 238.000.445,00 | 126.897.523,00 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Angg0ta DPRD | 111.102.922,00 | 238.000.445,00 | 126.897.523,00 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.943.360.000,00 | 4.297.360.000,00 | 354.000.000,00 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 3.893.360.000,00 | 4.247.360.000,00 | 354.000.000,00 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 3.704.160.000,00 | 3.704.160.000,00 | 0,00 |
| 5101.04.130001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 3.704.160.000,00 | 3.704.160.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 338.376.502,00 | 288.110.018,00 | -50.266.484,00 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 58.246.500,00 | 58.246.500,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.010001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 58.246.500,00 | 58.246.500,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 8154.510,00 | 8.154.510,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 8.154.510,00 | 8.154.510,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 104.843700,00 | 104.843.700,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 104.843.700,00 | 104.843.700,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.652.740,00 | 8.652.740,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.652.740,00 | 8.652.740,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 976.971,00 | 976.971,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 976.971,00 | 976.971,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.958,00 | 2.958,00 | 0,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 2.958,00 | 2.958,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 0,00 | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 0,00 | 5.241.600,00 | 5.241.600,00 |
| 5.1.01.05.10 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | 127.531.163,00 | 66.251.115,00 | -61.280.048,00 |
| 5.1.01.05.10.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 2.428.569,00 | 3.466.188,00 | 1.037.619,00 |
| 5.1.01.05.10.0007 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 8.250.000,00 | 14.718.000,00 | 6.468.000,00 |
| 5.1.01.05.10.0008 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 211.860,00 | 16.500,00 | -195.360,00 |
| 5.1.01.05.10.0009 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 3.366.000,00 | 4.234.478,00 | 868.478,00 |
| 5.1.01.05.10.0010 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 61.887.870,00 | 0,00 | -61.887.870,00 |
| 5.1.01.05.10.0013 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 85.800,00 | 42.900,00 | -42.900,00 |
| 5.1.01.05.10.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 20.275.000,00 | 10.863.600,00 | -9.411.400,00 |
| 5.1.01.05.10.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 26.083.509,00 | 25.417.038,00 | -666.471,00 |
| 5.1.01.05.10.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 4.942.555,00 | 7.492.411,00 | 2.549.856,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 29.967.960,00 | 35.739.924,00 | 5.771.964,00 |
| 5.1.01.05.11.0001 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 1.402.500,00 | 1.653.168,00 | 250.668,00 |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 2.475000,00 | 3.404.016,00 | 929.016,00 |
| 5.1.01.05.11.0005 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 10.230.000,00 | 15.100.800,00 | 4.870.800,00 |
| 5.1.01.05.11.0014 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.243.900,00 | 2.623.500,00 | -620.400,00 |
| 5.1.01.05.11.0015 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11.0016 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan | 1.815.000,00 | 1.887.600,00 | 72.600,00 |
| 5.1.01.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 5.521.560,00 | 5.790.840,00 | 269.280,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASS(1) | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.01.05.11.0031 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 4.455.000,00 | 4.455.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 710.880.000,00 | 510.880.000,00 | -200.000.000,00 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000,00 | 110.880.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 110.880.000,00 | 110.880.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 600.000.000,00 | 400.000.000,00 | -200.000.000,00 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 600.000.000,00 | 400.000.000,00 | -200.000.000,00 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 25.151.578.527,00 | 22.420.752.512,25 | -2.730.826.014,75 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 25.151.578527,00 | 22.420.752.512,25 | -2.730.826.014,75 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 25.151.578.527,00 | 22.420.752.512,25 | -2.730.826.014,75 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.207.783.812,87 | 189.919.217.773,77 | -9.288.566.039,10 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 44.726.535684,19 | 42.490.610.708,39 | -2.235.924.975,80 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 44.476.535.684,19 | 42.465.050.708,39 | -2.011.484.975,80 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 0,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 |
| 5.102.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 26906.000,00 | 144.701.600,00 | 117.795.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.647.917.095,00 | 1.876.600.636,50 | 228.683.541,50 |
| 5.1.02.01.01.0007 | Belanja Bahan-Barang dalam Proses | 74.295.000,00 | 62.664.000,00 | -11.631.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 48750.000,00 | 897.566.000,00 | 848.816.000,00 |
| 51.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3136.000,00 | 3.136.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 37 5.200,00 | 762.800,00 | -2.952.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 504.536.000,00 | 148.636.000,00 | -355.900.000,00 |
| 5.102.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 4.065.680.130,00 | 3.946.311.041,00 | -119.369.089,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 298.249.605,00 | 570.974.040,00 | 272.724.435,00 |
| 5.1.02.01.01.0022 | Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial | 17.772.000,00 | 5.680.000,00 | -12.092.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3718.925,00 | 3.718.925,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 745.395.590,28 | 597.572.581,28 | -147.823.009,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 576.721.020,00 | 620.053.189,90 | 43.332.169,90 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 1.272.199.186,91 | 1.120.806.753,31 | -151.392.433,60 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 90.592.750,00 | 76.320.000,00 | -14.272.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 420.244.914,00 | 409.330.256,25 | -10.914.657,75 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 233.390.026,00 | 329.451.014,65 | 96.060.988,65 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 198.629.235,00 | 220.099.037,00 | 21.469.802,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | 4.600.000,00 | 2.100.000,00 | -2.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 58.506.300,00 | 157.407.500,00 | 98.901.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 52.671.000,00 | 300.843.568,00 | 248.172.568,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | BelanjaObat-Obatan-Obat | 1.504.891.440,00 | 1.764.512.459,00 | 259.621.019,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 0,00 | 341.670.000,00 | 341.670.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 12.976.926.956,00 | 14.625.320.666,00 | 1.648.393.710,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | BelanjaBarang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.100.000.000,00 | 2.640.500.000,00 | 1.540.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 2.138.754.851,00 | 1.557.742.824,00 | -581.012.027,00 |
| 5.1.02.01.01.0046 | Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.873.719.300,00 | 5.126.728.491,50 | -1.746.990.808,50 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.651.616.160,00 | 1.994.271.325,00 | 342.655.165,00 |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 5.461.996.000,00 | 366.465.000,00 | -5.095.531.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 1.536.120.000,00 | 1.136.120.000,00 | -400.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 269.535.000,00 | 274.865.000,00 | 5.330.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 94.200.000,00 | 233.350.000,00 | 139.150.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 27.450.000,00 | 0,00 | -27.450.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 63.450.000,00 | 76.350.000,00 | 12.900.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 53.750.000,00 | 66.900.000,00 | 13.150.000,00 |
| 5.102.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 60.000.000,00 | 106.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 115.600.000,00 | 235.300.000,00 | 119.700.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 5.200000,00 | 16.400.000,00 | 11.200.000,00 |
| 5.102.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 186.900.000,00 | 389.970.000,00 | 203.070.000,00 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 0,00 | 13.060.000,00 | 13.060.000,00 |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 0,00 | 13.060.000,00 | 13.060.000,00 |
| 5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 250.000.000,00 | 12.500.000,00 | -237.500.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0103 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| 5.1.02.01.04.0111 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan | 250.000.000,00 | 0,00 | -250.000.000,00 |



| KA BAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 62.690.585.165,68 | 64.231.012.621,17 | 1.540.427.455,49 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 41.009.130.015,68 | 45.300.594.886,17 | 4.291.464.870,49 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.810.550.000,00 | 2.429.179.988,00 | -381.370.012,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1.485.100.000,00 | 1.338.757.500,00 | -146.342.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 118.000.000,00 | 204.600.000,00 | 86.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 814.150.000,00 | 1.224.191.170,00 | 410.041.170,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 10.000.000,00 | 6.400.000,00 | -3.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 14.400.000,00 | 38.690.333,00 | 24.290.333,00 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 435.600.000,00 | 343.200.000,00 | -92.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 1.530.900.000,00 | 1.980.671.250,00 | 449.771.250,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 10.282.970.000,00 | 8.545.532.631,00 | -1.737.437.369,00 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 0,00 | 10.000.000,00 | 10000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 430.200.000,00 | 648.262.500,00 | 218.062.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.165.800.000,00 | 1.796.020.230,00 | 630.220.230,00 |
| 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 259.500.000,00 | 367.588.307,00 | 108.088.307,00 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 81.600.000,00 | 122.400.000,00 | 40.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 168.300.000,00 | 240.170.835,00 | 71.870.835,00 |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 38.250.000,00 | 467.025.000,00 | 428.775.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 15.300.000,00 | 0,00 | -15.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 7.976.700.000,00 | 6.951.695.912,49 | -1.025.004.087,51 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 63.300.000,00 | 144.991.522,00 | 81.691.522,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 807.650.000,00 | 2.611.742.500,00 | 1.804.092.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.921.100.000,00 | 1.994.780.000,00 | 73.680.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1.733850.000,00 | 3.254.350.000,00 | 1.520.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 168.950.000,00 | 281.750.000,00 | 112.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka | 61.200.000,00 | 0,00 | -61.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 1.023.300.000,00 | 1.502.585.000,00 | 479.285.000,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 54.000.000,00 | 0,00 | -54.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 100.300.000,00 | 95.274.985,00 | -5.025.015,00 |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 24.263.600,00 | 63.004.185,00 | 38.740.585,00 |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 45000000,00 | 102.700.000,00 | 98.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0043 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 103.377.580,00 | 304.745.580,00 | 201.368.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 225.000.000,00 | 650.000.000,00 | 425.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 40.000.000,00 | 59.650.000,00 | 19.650.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 147.295.000,00 | 147.295.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 6.900.000,00 | 12.017.500,00 | 5.117.500,00 |
| 5.102.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 631.900.000,00 | 1.308.042.730,00 | 676.142.730,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 418.498.228,00 | 415.960.914,00 | -2.537.314,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 2.471.532.307,68 | 2.227.746.121,68 | -243.786.186,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 1.268.900.800,00 | 1.199.112.282,00 | -69.788.518,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 33.265.000,00 | 45.565.000,00 | 12.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya | 557.000.000,00 | 264.501.300,00 | -292.498.700,00 |
| 5.1.02.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 0,00 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 166.917.500,00 | 302.583.610,00 | 135.666.110,00 |
| 5.1.02.02.01.0068 | Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum | 957.000.000,00 | 1.044.000.000,00 | 87.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 85.000.000,00 | 55.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 104.500.000,00 | 42.000.000,00 | -62.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 65.960.000,00 | 61.511000,00 | -4.449.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 10.289.356150,00 | 13.034.451.008,00 | 2.745.094.858,00 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 1.417.233.408,00 | 1.417.233.408,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 2.580.693.750,00 | 0,00 | -2.580.693.750,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 7.317.542.400,00 | 7.317.542.400,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 0,00 | 3.485.748.800,00 | 3.485.748.800,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi NonASN | 0,00 | 241.755.840,00 | 241.755.840,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 0,00 | 161.170.560,00 | 161.170.560,00 |
| 5.1.02.02.02.0009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS | 250.000.000,00 | 75.000.000,00 | -175.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0012 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan | 141.120.000,00 | 336.000.000,00 | 194.880.000,00 |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 1.769.150.000,00 | 927.904.000,00 | -841.246.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0012 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 858.400.000,00 | 523.754.000,00 | -334.646.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 203.300.000,00 | 43.300.000,00 | -160.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0043 | Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 198.000.000,00 | 0,00 | -198.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 31.200.000,00 | 19.000.000,00 | -12.200.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 478.250.000,00 | 320.350.000,00 | -157.900.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 3.918.842.000,00 | 2.975.476.000,00 | -943.366.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0006 | Belanja Sewa Bangunan Kesehatan | 45.000.000,00 | 45.000000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.671.842.000,00 | 2.787.176.000,00 | -884.666.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 30.000.000,00 | 1.000.000,00 | -29.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 0,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 100.000.000,00 | 50.700.000,00 | -49.300.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 5.1.02.02.07.0034 | Belanja Sewa Barang Kerajinan | 0,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 3.295.000.000,00 | 470.000.000,00 | -2.825.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | 2.050.000.000,00 | 90.000.000,00 | -1.960.000.000,00 |
| 5.1.02.02.080007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS II | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 250.000.000,00 | 70.000.000,00 | -180.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0026 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 895.000.000,00 | 180.000.000,00 | -715.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 820.000.000,00 | 384.940.727,00 | -435.059.273,00 |
| 5.1.02.02.09.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan | 0,00 | 369.665.726,00 | 369.665.726,00 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 600.000.000,00 | 0,00 | -600.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 220.000.000,00 | 15.275.001,00 | -204.724.999,00 |
| 5.1.02.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) | 633.976.000,00 | 629.976.000,00 | -4.000.000,00 |
| 5.1.02.02.10.0007 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan | 37.056.000,00 | 37.056.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.10.0008 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telek0munikasi dan Informatika | 112.750.000,00 | 112.500.000,00 | -250.000,00 |
| 5.1.02.02.10.0017 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan | 484.170.000,00 | 480.420.000,00 | -3.750.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 920.131.000,00 | 468.820.000,00 | -451.311.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 191.645.000,00 | 357.720.000,00 | 166.075.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 517.686.000,00 | 111.100.000,00 | -406.586.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 210.800.000,00 | 0,00 | -210.800.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 5.696.728.345,00 | 4.479.854.870,00 | -1.216.873.475,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.005.235.750,00 | 1.143.987.788,00 | 138.752.038,00 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 180.000.000,00 | 40.000.000,00 | -140.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 305.700.000,00 | 265.000.000,00 | -40.700.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 176.500.000,00 | 353.850.000,00 | 177.350.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermot0r-Kendaraan Bermotor Khusus | 80.005.750,00 | 100.000.000,00 | 19.994.250,00 |
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 0,00 | 20.240.000,00 | 20.240.000,00 |



| KA BAG HUKUM | DINS. SIBA DAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 7.500.000,00 | 16.500.000,00 | 9.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 116.630.000,00 | 141.860.000,00 | 25.230.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 32.190.000,00 | 54.070.000,00 | 21.880.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0125 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat | 4.880.000,00 | 0,00 | -4.880.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0237 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya | 0,00 | 51.594.188,00 | 51.594.188,00 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 69.080.000,00 | 66.023.600,00 | -3.056.400,00 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 22.250.000,00 | 14.350.000,00 | -7.900.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 497.869.605,00 | 1.551.741.472,00 | 1.053.871.867,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 497.869.605,00 | 1.502.246.183,00 | 1.004.376.578,00 |
| 5.1.02.03.03.0011 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.0303.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 0,00 | 34.495.289,00 | 34.495.289,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 4.191.296.590,00 | 1.781.799.210,00 | -2.409.497.380,00 |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten | 2.971.296.590,00 | 1.687.899.210,00 | -1.283.397.380,00 |
| 5.1.02.03.04.0013 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten | 300.000.000,00 | 0,00 | -300.000.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0027 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi | 650.000.000,00 | 0,00 | -650.000.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0048 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 0,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0051 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 200.000.000,00 | 75.000.000,00 | -125.000.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0067 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku | 70.000.000,00 | 0,00 | -70.000.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5.1.02.03.06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 2326.400,00 | 2.326.400,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | 2.326.400,00 | 2.326.400,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.005.830.967,00 | 21.963.043.752,94 | -5.042.787.214,06 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 27.005.830.967,00 | 21.963.043.752,94 | -5.042.787.214,06 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.225.885.247,00 | 18.489.370.460,94 | -1.736.514.786,06 |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | 4.054.575.000,00 | 1.409.640.000,00 | -2.644.935.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.414.915.720,00 | 1856.173.292,00 | -558.742.428,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 298.455.000,00 | 207.860.000,00 | -90.595.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 12.000.000,00 | 0,00 | -12.000.000,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 808.865.000,00 | 1.463.815.000,00 | 654.950.000,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 275.850.000,00 | 292.500.000,00 | 16.650.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 227.850.000,00 | 165.900.000,00 | -61.950.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 48.000.000,00 | 101.600.000,00 | 53.600.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 533.015.000,00 | 1.171.315.000,00 | 638.300.000,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 208.415.000,00 | 362.415.000,00 | 154.000.000,00 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 324.600.000,00 | 808.900.000,00 | 484.300.000,00 |
| 5.1.02.89 | Belanja Barang dan Jasa BOSP | 21.445.872000,00 | 15.840.708.826,59 | -5.605.163.173,41 |
| 5.1.02.89.01 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS | 21.245.682000,00 | 14.541.432.284,59 | -6.704.249.715,41 |
| 5.1.02.89.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler | 19.871.682.000,00 | 13.253.956.073,59 | -6.617.725.926,41 |
| 5.1.02.89.01.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja | 1.374.000.000,00 | 1.287.476.211,00 | -86.523.789,00 |
| 51.02.89.02 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD | 120.000.000,00 | 1.207.473.842,00 | 1.087.473.842,00 |
| 5.1.02.89.02.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler | 0,00 | 1.132.473.842,00 | 1.132.473.842,00 |
| 5.1.02.89.02.0002 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja | 120.000.000,00 | 75.000.000,00 | -45.000.000,00 |
| 5.1.02.89.03 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan | 80.190.000,00 | 91.802.700,00 | 11.612.700,00 |
| 5.1.02.89.03.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 80.190.000,00 | 91.802.700,00 | 11.612.700,00 |
| 5.1.02.90 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 6.917.154.000,00 | 7.521.309.000,00 | 604.155.000,00 |
| 5.1.02.90.01 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 6.917.154.000,00 | 7.521.309.000,00 | 604.155.000,00 |
| 5.1.02.90.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 6.917.154.000,00 | 7.521.309.000,00 | 604.155.000,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 29.916.212.651,00 | 31.928.862.994,68 | 2.012.650.343,68 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 29.916.212.651,00 | 31.928.862.994,68 | 2.012.650.343,68 |



| KA BAG HUKUM | DINAS/BADAN/ KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 29.916.212.651,00 | 31.928.862.994,68 | 2.012.650.343,68 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 7.859.290.384,00 | 6.294.090.384,00 | -1.565.200.000,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 4.215.000.000,00 | 2.347.800.000,00 | -1867.200.000,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 3.615.000.000,00 | 1.997.800.000,00 | -1.617.200.000,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 3.615.000.000,00 | 1.997.800.000,00 | -1.617.200.000,00 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 600.000.000,00 | 350.000.000,00 | -250.000.000,00 |
| 5.105.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 600.000.000,00 | 350.000.000,00 | -250.000.000,00 |
| 5.1.05.06 | Belanja Hibah Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05.06.02 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05.06.02.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05.06.03 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05.06.03.0001 | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 769.295.384,00 | 769.295.384,00 | 0,00 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 769.295.384,00 | 769.295.384,00 | 0,00 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 769.295.384,00 | 769.295.384,00 | 0,00 |
| 5.1.05.08 | Belanja Hibah Dana BOSP | 2874.995.000,00 | 3.176.995.000,00 | 302.000.000,00 |
| 5.1.05.08.01 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 0,00 | 257.000.000,00 | 257.000.000,00 |
| 5.1.05.08.01.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 0,00 | 257.000.000,00 | 257.000.000,00 |
| 5.1.05.08.02 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 2.579.865.000,00 | 2.579.865.000,00 | 0,00 |
| 5.1.05.08.02.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 2.579.865.000,00 | 2.579.865.000,00 | 0,00 |
| 5.1.05.08.03 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 295.130.000,00 | 340.130.000,00 | 45.000.000,00 |
| 5.1.05.08.03.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 295.130.000,00 | 340.130.000,00 | 45.000.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **114.111.61[illegible].632,00** | **107.461.532.080,00** | **-6.650.128.552,00** |
| 5.201 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 0,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 |
| 5.2.01.01.01.0001 | Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS[illegible] | SEKDA | WABUP

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 0,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.022.160.600,00 | 47.772.014.907,00 | 12.749.854.307,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 6.464.269.000,00 | 6.551.269.000,00 | 87.000.000,00 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.01.0006 | Belanja Modal Asphalt Equipment | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 6.464.269.000,00 | 6.551.269.000,00 | 87.000.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0001 | Belanja Modal Alat Penarik | 0,00 | 77.000.000,00 | 77.000.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0008 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor | 3.400.000.000,00 | 3.400.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.01.030016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 1.764.269.000,00 | 1.764.269.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 3.359.101.000,00 | 2.850.900.000,00 | -508.201.000,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 3.359.101.000,00 | 2.850.900.000,00 | -508.201.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 3.180.000.000,00 | 2.720.000.000,00 | -460.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 179.101.000,00 | 130.900.000,00 | -48.201.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 100.000.000,00 | 5.050.500,00 | -94.949.500,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 100.000.000,00 | 5.050.500,00 | -94.949.500,00 |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 0,00 | 5.050.500,00 | 5.050.500,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 0,00 | 175.627.000,00 | 175.627.000,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 0,00 | 175.627.000,00 | 175.627.000,00 |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 0,00 | 175.627.000,00 | 175.627.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.508.450.640,00 | 6.440.311.282,00 | 3.931.860.642,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 88.300.000,00 | 1.245.350.945,00 | 1.157.050.945,00 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 55.000.000,00 | 0,00 | -55.000.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 33.300.000,00 | 1.245.350.945,00 | 1.212.050.945,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 2.023.212.440,00 | 4.894.741.903,00 | 2.871.529.463,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 1.146.451.695,00 | 3.271.519.500,00 | 2.125.067.805,00 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 39.210.750,00 | 27.781.080,00 | -11.429.670,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 324.786.690,00 | 1.475.265.928,00 | 1.150.479.238,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 447.906.910,00 | 103.466.000,00 | -344.440.910,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 64.856.395,00 | 16.709.395,00 | -48.147.000,00 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 396.938.200,00 | 300.218.434,00 | -96.719.766,00 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 59.075.000,00 | 133.725.515,00 | 74.650.515,00 |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 80.121.000,00 | 103.491.085,00 | 23.370.085,00 |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | -25.000.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0005 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | 9.028.600,00 | 15.919.176,00 | 6.890.576,00 |
| 5.2.02.05.03.0006 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 201.640.000,00 | 19.536.000,00 | -182.104.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 12.073.600,00 | 17.546.658,00 | 5.473.058,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 10.000.000,00 | 516.769.000,00 | 506.769.000,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 10.000.000,00 | 516.769.000,00 | 506.769.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studi0 Audio | 10.000.000,00 | 51.200.000,00 | 41.200.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0,00 | 465.569.000,00 | 465.569.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 16.963.905.780,00 | 17.446.454.724,00 | 482.548.944,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 16.963.905.780,00 | 16.963.905.780,00 | 0,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 16.963.905.780,00 | 16.963.905.780,00 | 0,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 0,00 | 482.548.944,00 | 482.548.944,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 0,00 | 482.548.944,00 | 482.548.944,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.118.107.000,00 | 4.477.382.000,00 | 2.359.275.000,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Lab0ratorium | 0,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 |
| 5.2.02.08.01.0016 | Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi | 0,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 2.118.107.000,00 | 4.330.732.000,00 | 2.212.625.000,00 |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang StudiIPA Menengah | 170.775.000,00 | 150.000.000,00 | -20.775.000,00 |
| 5.2.02.08.03.0008 | Alat Peraga Praktek Sek0lah Bidang Studi:Agama | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK | 1.947.332.000,00 | 4.080.732.000,00 | 2.133.400.000,00 |
| 5.2.02.08.08 | Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydr0dinamica | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 5.202.08.08.0006 | Belanja Modal Peralatan Umum | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 1.682.524.280,00 | 3.397.149.860,00 | 1.714.625.580,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 1.408.637.740,00 | 2.872.199.080,00 | 1.463.561.340,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 1.408637.740,00 | 2.872.199.080,00 | 1.463.561.340,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 273.886.540,00 | 524.950.780,00 | 251.064.240,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 240.212.890,00 | 348.614.780,00 | 108.401.890,00 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 27.336.000,00 | 176.336.000,00 | 149.000.000,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 6.337.650,00 | 0,00 | -6.337.650,00 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 0,00 | 658.118.528,00 | 658.118.528,00 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 0,00 | 658.118.528,00 | 658.118.528,00 |
| 5.2.02.19.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Air | 0,00 | 58.118.528,00 | 58.118.528,00 |
| 5.2.02.19.01.0006 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.02.89 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 445.725.000,00 | 3.269.704.993,00 | 2.823.979.993,00 |
| 5.2.02.89.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS | 0,00 | 2.785.289.993,00 | 2.785.289.993,00 |
| 5.2.02.89.01.0001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler | 0,00 | 2.742.789.993,00 | 2.742.789.993,00 |
| 5.2.02.89.01.0002 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja | 0,00 | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 |
| 5.2.02.89.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD | 445.725.000,00 | 484.415.000,00 | 38.690.000,00 |
| 5.2.02.89.02.0001 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler | 445.725.000,00 | 484.415.000,00 | 38.690.000,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.370.077.900,00 | 1.983.278.020,00 | 613.200.120,00 |
| 5.2.02.99.99 | BelanjaModal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.370.077.900,00 | 1.983.278.020,00 | 613.200.120,00 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1370.077.900,00 | 1.983.278.020,00 | 613.200.120,00 |
| 5.203 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 34.947626.032,00 | 32.593.344.219,00 | -2.354.281.813,00 |
| 5.203.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 33.877.626.032,00 | 30.333.528.534,00 | -3.544.097.498,00 |
| 5.203.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 33.594.018.032,00 | 29.333.744.534,00 | -4.260.273.498,00 |
| 5.203.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 5.047.834.000,00 | 3.984.268.566,00 | -1.063.565.434,00 |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 200.000.000,00 | 307.000.000,00 | 107.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium | 0,00 | 251.455.949,00 | 251.455.949,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 22.656.283.808,00 | 21.833.018.408,00 | -823.265.400,00 |
| 5.203.01.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 174.800.000,00 | 0,00 | -174.800.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0009 | BelanjaModal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 415.000.000,00 | 0,00 | -415.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 3.405.446.000,00 | 1.748.358.580,00 | -1.657.087.420,00 |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 1.130.000.000,00 | 600.000.000,00 | -530.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 149.754.224,00 | 0,00 | -149.754.224,00 |
| 5.2.03.01.01.0013 | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | 40.000.000,00 | 0,00 | -40.000.000,00 |
| 5.203.01.01.0014 | Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool | 0,00 | 203.300.000,00 | 203.300.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 200000.000,00 | 208.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 74.900.000,00 | 181.900.000,00 | 107.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 100.000.000,00 | 5.000.000,00 | -95.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 0,00 | 10.793.031,00 | 10.793.031,00 |
| 5.2.03.01.02 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 283.608.000,00 | 999.784.000,00 | 716.176.000,00 |
| 5.2.03.01.02.0001 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.203.01.02.0002 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan II | 0,00 | 460.434.000,00 | 460.434.000,00 |
| 5.2.03.01.02.0004 | Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 283.608.000,00 | 539.350.000,00 | 255.742.000,00 |



| KA BAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WA BUP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.03.02 | Belanja Modal Monumen | 0,00 | 99.801.210,00 | 99.801.210,00 |
| 5.2.03.02.01 | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 0,00 | 99.801.210,00 | 99.801.210,00 |
| 5.2.03.02.01.0002 | Belanja Modal Tugu | 0,00 | 99.801.210,00 | 99.801.210,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 1.060.000.000,00 | 2.010.014.475,00 | 950.014.475,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 1.060.000.000,00 | 2.010.014.475,00 | 950.014.475,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 1.060.000.000,00 | 2.010.014.475,00 | 950.014.475,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 10.000.000,00 | 150.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 43.951.874.000,00 | 22.158.757.678,00 | -21.793.116.322,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 37.672.674000,00 | 19.569.716.711,00 | -18.102.957.289,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 23.946.177.760,00 | 19.569.716.711,00 | -4.376.461.049,00 |
| 5.2.04.01.010003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 23.946.177.760,00 | 19.459.868.711,00 | -4.486.309.049,00 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 0,00 | 109.848.000,00 | 109.848.000,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 13.726.496.240,00 | 0,00 | -13.726.496.240,00 |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 13.726.496240,00 | 0,00 | -13.726.496.240,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 5.669.200.000,00 | 1.966.520.167,00 | -3.702.679.833,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 230000.000,00 | 0,00 | -230.000.000,00 |
| 5.2.04.02.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi | 230000.000,00 | 0,00 | -230.000.000,00 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 5.339.200.000,00 | 1.966.520.167,00 | -3.372.679.833,00 |
| 5.2.04.02.04.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 2.840.000.000,00 | 200.000.000,00 | -2.640.000.000,00 |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 2.499.200.000,00 | 1.766.520.167,00 | -732.679.833,00 |
| 5.2.04.02.06 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 |
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 100.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 610.000.000,00 | 622.520.800,00 | 12.520.800,00 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 610.000.000,00 | 622.520.800,00 | 12.520.800,00 |
| 5.2.04.03.01.0003 | Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam | 610.000.000,00 | 622.520.800,00 | 12.520.800,00 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 3.942.415.276,00 | 3.942.415.276,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 0,00 | 1.005.046.720,00 | 1.005.046.720,00 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 0,00 | 1.005.046.720,00 | 1.005.046.720,00 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 0,00 | 1.005.046.720,00 | 1.005.046.720,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP |
|---|---|---|---|---|
| | | - | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.05.89 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 0,00 | 2.937.368.556,00 | 2.937.368.556,00 |
| 5.2.05.89.01 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS | 0,00 | 2.935.868.556,00 | 2.935.868.556,00 |
| 5.2.05.89.01.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler | 0,00 | 2.740.336.246,00 | 2.740.336.246,00 |
| 5.2.05.89.01.0002 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja | 0,00 | 195.532.310,00 | 195.532.310,00 |
| 5.2.05.89.02 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.05.89.02.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 190.000.000,00 | 345.000.000,00 | 155.000.000,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 190.000.000,00 | 345.000.000,00 | 155.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 190.000.000,00 | 345.000.000,00 | 155.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 115.000.000,00 | 95.000.000,00 | -20.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01.0006 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian | 75.000.000,00 | 250.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **0,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1000.000.000,00 | 0,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1000.000.000,00 | 0,00 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **120.026.903.776,94** | **118.592.069.219,00** | **-1.434.834.557,94** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.473.563.122,94 | 2.396.068.233,00 | 922.505.110,06 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 1.236.350.798,94 | 2.176.362.599,00 | 940.011.800,06 |
| 5.4.01.01.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.236.350.798,94 | 2.176.362.599,00 | 940.011.800,06 |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.236.350.798,94 | 2.176.362.599,00 | 940.011.800,06 |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 237.212.324,00 | 219.705.634,00 | -17.506.690,00 |
| 5.4.01.02.01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 237.212.324,00 | 219.705.634,00 | -17.506.690,00 |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 237.212.324,00 | 219.705.634,00 | -17.506.690,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 118.553.340.654,00 | 116.196.000.986,00 | -2.357.339.668,00 |
| 5.4.02.01 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi | 161.419.554,00 | 0,00 | -161.419.554,00 |
| 5.4.02.01.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi | 161.419.554,00 | 0,00 | -161.419.554,00 |
| 5.4.02.01.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi | 161.419.554,00 | 0,00 | -161.419.554,00 |
| 5.4.02.04 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 0,00 | 781.493.886,00 | 781.493.886,00 |
| 5.4.02.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi | 0,00 | 781.493.886,00 | 781.493.886,00 |



| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASS II | SEKDA | WALIKOTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4.02.04.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi | 0,00 | 781.493.886,00 | 781.493.886,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 118.391.921.100,00 | 115.414.507.100,00 | -2.977.414.000,00 |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 118.391.921.100,00 | 115.414.507.100,00 | -2.977.414.000,00 |
| 5.4.02.05.02.0004 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa | 69.679.459.000,00 | 69.679.459.000,00 | 0,00 |
| 5.4.02.05.02.0005 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa | 48.712.462.100,00 | 45.735.048.100,00 | -2.977.414.000,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **857.706.086.308,00** | **834.393.841.371,87** | **-23.312.244.936,13** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **-100.000.000,00** | **-29.394.604.616,85** | **-29.294.604.616,85** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **100.000.000,00** | **29.394.604.616,85** | **29.294.604.616,85** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 100.000.000,00 | 29.394.604.616,85 | 29.294.604.616,85 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 22.303.074.390,83 | 22.203.074.390,83 |
| 6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 100.000.000,00 | 22.303.074.390,83 | 22.203.074.390,83 |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 100.000.000,00 | 22.303.074.390,83 | 22.203.074.390,83 |
| 6.1.01.08 | Sisa Belanja Lainnya | 0,00 | 7.091.530.226,02 | 7.091.530.226,02 |
| 6.1.01.08.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 0,00 | 4.434.197.862,93 | 4.434.197.862,93 |
| 6.1.01.08.01.0001 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD | 0,00 | 4.434.197.862,93 | 4.434.197.862,93 |
| 6.1.01.08.04 | Sisa Dana BOSP | 0,00 | 598.366.286,09 | 598.366.286,09 |
| 6.1.01.08.04.0001 | Sisa Dana BOSP-BOS Reguler | 0,00 | 411.151.223,09 | 411.151.223,09 |
| 6.1.01.08.04.0002 | Sisa Dana BOSP-BOS Kinerja | 0,00 | 174.008.521,00 | 174.008.521,00 |
| 6.1.01.08.04.0003 | Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 0,00 | 1.593.842,00 | 1.593.842,00 |
| 6.1.01.08.04.0005 | Sisa Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 0,00 | 11.612.700,00 | 11.612.700,00 |
| 6.1.01.08.05 | Sisa Dana BOK Puskesmas | 0,00 | 2.058.966.077,00 | 2.058.966.077,00 |
| 6.1.01.08.05.0001 | Sisa Dana BOK Puskesmas | 0,00 | 2.058.966.077,00 | 2.058.966.077,00 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **100.000.000,00** | **29.394.604.616,85** | **29.294.604.616,85** |
| | **Pembiayaan Netto** | **100.000.000,00** | **29.394.604.616,85** | **29.294.604.616,85** |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kab. Boalemo, 24 Oktober 2025

Bupati

RUM PAGAU